

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia sedang sibuk dan serius membangun wacana perdamaian (*peace*). Wacana yang membawa kita pada titik tertinggi bagi pengharapan umat manusia untuk menatap kehidupan di masa depan. Berbagai instrumen perdamaian telah diformulasikan dalam opsi-opsi program kemanusiaan. Tidak mengherankan apabila lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai Pemerintah Republik Indonesia melalui percikan kebijakannya menetes ke Kementerian terkait bersama-sama menapaki perjalanan yang cukup terjal dan melelahkan dalam mengusung perdamaian. Kesemuanya itu merupakan wujud keseriusan dunia dalam menciptakan dan ingin berjumpa dengan perdamaian kelak.

PBB melalui *United Nations Peacekeeping Operations* (Misi Pemeliharaan Perdamaian) yang merupakan “*flagship enterprise*” dibentuk sebagai *tools* untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dengan berakhirnya Perang Dingin, konteks penggelaran MPP PBB berubah dari misi “tradisional” yang mengedepankan tugas-tugas militer menjadi misi yang lebih “multidimensional”. Paradigma perdamaian telah bergeser, sebagaimana narasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam liputan khususnya (16/7/2019 melalui <https://kemlu.go.id>) bahwa,

sifat dari konflik yang harus dihadapi oleh MPP PBB juga mengalami perubahan. Sebelumnya, mayoritas MPP PBB dihadapkan pada konflik antar negara, namun saat ini MPP PBB dituntut untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga dihadapkan pada realitas semakin meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular.

MPP PBB akan memasuki ruang privasi, yaitu “lingkungan dan rumah-rumah masyarakat” yang bergejolak dalam konflik internal maupun perang saudara. Kondisi semacam ini cukup memprihatinkan sekaligus merupakan tamparan keras tiada henti bagi negara-negara dengan kemerdekaan hukumnya.

Menjadi ironis, ketika konflik di dunia harus dihapuskan, sebab permasalahan ini menjadi perusak peradaban.

Searah dengan itu, sesungguhnya sejak bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya telah lama meletakkan fondasi filosofis dan berkomitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini tercantum dalam amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada spirit historis yang terpendam dan perlu digali dari amanat tersebut untuk menemukan korelasi ruang privasi dengan kemerdekaan negara dalam mewujudkan perdamaian. Terlebih jika isu perdamaian tidak ingin meratapi nasibnya dan berhenti pada ruang persilangan retorika atau diskursus semata yang justru membuka konflik baru.

Selanjutnya, Indonesia sebagai negara multikultural dalam perjalanan panjangnya mengelola negara selalu dihantui oleh konflik bernuansa horizontal dan vertikal di tengah masyarakatnya. Jika ditelaah melalui perspektif historis-sosiologis secara kontemplatif, maka kondisi demikian merupakan pusaka yang perlu dibingkai dengan nalar bersama. Bahkan J.S. Furnivall (dalam Nasikun, 2006, hlm. 35) telah memperkenalkan kepada dunia melalui risetnya bahwa keberagaman suku, agama, adat dan kedaerahan di Indonesia sering kali disebut sebagai ciri masyarakat majemuk, suatu istilah untuk menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia sejak masa Hindia-Belanda. Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), yakni tipikal masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.

Kaitannya dengan kausalitas di atas, Indonesia sebagai negara yang plural dan heterogen tentu sangat rawan terhadap prasangka dan konflik. Nasikun (2006, hlm. 33) berasumsi bahwa,

kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Senada dengan asumsi tersebut, menurut Parsudi Suparlan (2002, hlm. 98) acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah pemahaman terhadap multikulturalisme, yaitu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Sehingga, corak masyarakat Indonesia tidak hanya berhenti pada simbol “Bhineka Tunggal Ika” yang hanya menerima keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya saja, melainkan membuka diri untuk memahami keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bahkan Clifford Geertz (dalam Hardiman, 2002, hlm. 4) menegaskan bahwa,

Indonesia ini sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini bukan hanya multi-etnis (Jawa, Bata, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusiansime, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya).

Perbedaan yang ada tersebut membawa berbagai konsekuensi, karena tidak semua interaksi antar manusia dan budaya berlangsung dengan baik. Terkadang timbul berbagai friksi dan benturan yang berakar pada kurangnya kesadaran akan perbedaan. Konflik Maluku, Poso, Papua, Lombok, Sambas, Pontianak, Lampung dan berbagai daerah lainnya merupakan contoh nyata terjadinya benturan yang umumnya disebabkan karena adanya perbedaan agama, status sosial, daerah asal dan faktor primordial lainnya.

Berdasarkan perspektif sejarah beberapa abad silam, kemajemukan selalu menampilkan perpecahan dan konflik di masyarakat sampai elite penguasa telah menunjukkan punya andil dalam keruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama sejak masuknya kekuatan imperialis Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda, pada abad 16 (Theodora dan Lee, *Kompas*, 14/12/2016, hlm. 4). Bernard H.M. Vlekke dalam bukunya *Nusantara Sejarah Indonesia*, mencatat pasca jatuhnya keagungan Kerajaan Majapahit pada tahun 1389, terjadi kekacauan politik. Parakitri Simbolon dalam *Menjadi Indonesia* menulis, perpecahan antar elite kerajaan serta rapuhnya struktur kebangsaan di tatanan masyarakat pada abad 16 itu memudahkan kolonialis bercokol di bumi Nusantara hingga berabad-abad. Kenyataan di atas, menurut John Pattikayhatu “bukan penjajah yang memecah belah kita”. Sebelum mereka masuk, kita sudah saling bertengkar. kelemahan itu

dimanfaatkan. Sangat mudah menaklukkan suatu wilayah ketika masyarakat dan pemimpinnya lemah akibat terus berkonflik” (Agnes dan Lee, *Kompas*, 14/12/2016, hlm. 4).

Keterkaitan antara masyarakat majemuk dan konflik, nampaknya perlu juga mengaitkan persoalan ini dengan kontrak sosial untuk membaca ulang konsep tentang bangsa. Pembahasan mengenai bangsa yang dapat digolongkan sebagai suatu uraian ilmiah, untuk pertama kali dapat ditemui dalam pidato Ernest Renan pada tanggal 11 Maret 1882 di Universitas Sorbone, Paris (Tarumbaka, 1999, hlm. 82). Dalam kesempatan tersebut Renan berusaha menjawab pertanyaan *Qu'est ce qui'une nation?* “apakah bangsa itu”. Menurut Renan, bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian. Sesuatu yang menimbulkan jiwa atau asas kerohanian ini ialah, pertama kemuliaan bersama di waktu lampau, yang dari aspek ini bangsa dapat disebut sebagai suatu hasil historis. Kedua, keinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu sekarang, jadi merupakan suatu persetujuan atau solidaritas besar dalam bentuk tetap mempergunakan warisan dari masa lampau tersebut bagi waktu sekarang dan seterusnya.

Lanjut menurut Renan, hal penting yang merupakan suara mutlak adanya bangsa yakni “*plebisit* setiap hari” yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa ini bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka akan memberikan kemajuan tetap bersatu dan terus hidup, tetapi bila tidak maka bangsa dimaksud pasti pecah dan hancur (Tarumbaka, 1999, hlm. 83). Sintesa keduanya telah melahirkan kriteria bahwa suatu bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun menjadi satu, karena saling berkeyakinan atas persamaan nasib dan tujuan. Maka, keinsafan itu pun semakin besar, karena malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat dan tertanam dalam hati dan otak setiap insan (Hatta, 1989, hlm. 13).

Kekhawatiran mengenai disintegrasi bangsa yang menjalar ke berbagai aspek kehidupan, tidak pernah surut seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu yang muncul kepermukaan akibat dari proses globalisasi. Kehadiran globalisasi itu sendiri bukanlah suatu fenomena baru dalam sejarah peradaban dunia.

Sebelum kemunculan negara-bangsa (*nation-state*), perdagangan dan migrasi lintas Benua telah sejak lama berlangsung. Jauh sebelumnya perdagangan regional telah membuat interaksi antar suku bangsa terjadi secara ilmiah. Sejak masa sejarah modern, khususnya sebelum memasuki abad 20, globalisasi dipandang sebagai gelombang masa depan.

Dua dekade sebelum Perang Dunia I, arus uang internasional telah merekatkan Eropa lebih erat dengan Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Namun, sejalan dengan siklus ekonomi dan politik dunia, gelombang globalisasi juga mengalami pasang surut. Salah satu kekuatan yang melatarbelakanginya adalah tarik-menarik antara paham internasionalis dengan nasionalis atau isolasionis (Basri, 2002, hlm. 192-193).

Globalisasi tidak bisa digeneralisasikan sebagai fenomena yang memiliki sisi baik bagi segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak berlaku bagi segalanya. Sehingga, globalisasi selalu menyangkut ekspansi kekayaan (*wealth*), bukan mengalokasikannya. Persoalan besar lain yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan dunia internasional untuk meliberalisasikan perekonomiannya adalah biaya sosial dan politik yang terjadi akibat terbukanya pasar barang dan pasar finansial. Liberalisasi barang, jasa, serta modal membuat posisi pekerja dan serikat pekerja kian melemah. Di lain pihak, tenaga kerja tidak terampil (*unskilled labor*) tidak bebas berpindah ke negara-negara yang tingkat upah rata-ratanya lebih tinggi. Jadi, liberalisasi yang terjadi lebih bersifat ke arah yang merugikan kepentingan negara-negara berkembang (Basri, 2002, hlm. 196).

Adapun, Bauman melihat globalisasi sebagai “Perang Luar Angkasa”. Menurut pandangannya, mobilitas menjadi faktor stratifikasi yang cukup kuat dan sangat didambakan di dunia saat ini. Jadi, para pemenangnya adalah mereka yang *mobile* (Ritzer, 2010, hlm. 639). Meminjam asumsi dari Arnold Toynbee (2007, hlm. 5) bahwa inilah sebagian teka-teki yang dihadirkan pada manusia oleh fenomena yang disadarinya. Dewasa ini dunia semakin serius mengusung perdamaian (*peace*), keadilan dan universalitas. Kondisi demikian, telah membawa pengharapan pada titik yang tinggi bagi seluruh umat akan usia hidup di masa depan.

Memasuki abad 21 masyarakat yang insaf atas persamaan nasib dan tujuan sebagai satu kesatuan bangsa harus mampu meringkai realitas perubahan zaman menjadi modal sosial kehidupan. Apalagi menurut Benyamin Fisher (dalam Sumaatmadja, 1986, hlm. 35) menyoroti bahwa,

Indonesia sedang meninggalkan tahap pra-industri menuju ke tahap transisi. Dengan demikian, Indonesia sedang meninggalkan tahap masyarakat tradisional, dan sedang menuju ke arah prakondisi untuk tinggal-landas.

Kondisi demikian, telah membawa kepada arah yang lebih spesifik bahwa ternyata mahasiswa sejarah yang pola pikirnya terbentuk dari pengalaman yang relatif heterogen, sangat mungkin prasangka dan konflik akan selalu hadir dalam dinamika kehidupan kampus, khususnya di lingkungan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UHAMKA.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau masyarakat umum secara populer mengenal kampus ini dengan sebutan UHAMKA. Kampus ini memiliki 8 (delapan) fakultas, di antaranya terdapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang di dalamnya ada Program Studi Pendidikan Sejarah. Berdasarkan dokumen penting yang dimiliki oleh kampus ini, secara eksplisit tercatat bahwa Program Studi Pendidikan Sejarah merupakan jurusan tertua semenjak kampus ini bernama IKIP Muhammadiyah Jakarta.

Selanjutnya, dengan berbagai dinamika dan perubahan yang begitu cepat dalam dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi. Maka, IKIP Muhammadiyah Jakarta melakukan konversi penyelenggaraan pendidikannya pada tahun 1997 menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Dalam proses perubahan itu, Program Studi Pendidikan Sejarah masih senapas menghasilkan calon guru Sejarah yang latar belakang sosio kulturalnya heterogen hingga saat peneliti melakukan penelitian ini.

Keberadaan Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA, berlokasi di Jalan Tanah Merdeka, Kelurahan Kampung Rambutan, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Secara geografis letaknya berdekatan dengan beberapa tempat yang menarik secara historis ataupun kebudayaan, seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tempat para wisatawan mengenal budaya Indonesia melalui rumah

adat, benda-benda, dan berbagai unsur kebudayaan lainnya, Museum Lubang Buaya sebagai tempat koleksi sumber-sumber sejarah dalam peristiwa Gerakan 30 September PKI dan dekat kompleks militer Komando Pasukan Khusus (Kopasus).

Rasionalisasi pemilihan Program Studi Pendidikan Sejarah sebagai lokasi penelitian, sekurang-kurangnya terdiri dari tiga penjelasan. *Pertama*, peneliti merupakan alumni Pendidikan Sejarah angkatan 2013 yang saat ini diberikan ruang untuk berkembang baik untuk keilmuan atau karir. *Kedua*, ketertarikan peneliti terhadap permasalahan khususnya mengenai prasangka dan konflik yang mengarah pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. *Ketiga*, lokasi penelitian dan tempat tinggal peneliti yang aksesnya mudah untuk dijangkau dan ditempuh selama 1 jam atau sepanjang 25 kilometer.

Sementara itu, subjek dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Semester VI (enam) di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA. Subjek penelitian berjumlah 33 orang dengan sebaran jumlah laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan 17 orang. Seluruh Mahasiswa Semester VI (enam) telah menyelesaikan jenjang semesternya dan mengontrak Mata Kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer pada Semester V (lima). Pemilihan subjek penelitian ini berguna untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk kepentingan peneliti.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi peneliti menentukan pemilihan lokasi dan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan *sampel purposif* yang dijabarkan sebagai berikut, *Pertama*, Mahasiswa Semester VI (enam) merepresentasikan keragaman kesukuan dan kedaerahan, seperti ada yang dari Riau, Jambi, Belitung, Lampung, Banten, Jakarta (Betawi), Sunda, Jawa, Mataram, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Bima. *Kedua*, Mahasiswa Semester VI (enam), terdiri dari berbagai latar belakang ideologis dan organisatoris, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pecinta Museum, Volunteer Lingkungan, dan Paguyuban dari perkumpulan mahasiswa daerah masing-masing. *Ketiga*, Mahasiswa Semester VI (enam), juga berasal dari kelas sosial yang tingkatannya berbeda-beda, dari mulai pekerjaan orang tuanya sebagai Tentara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengusaha, Kepala Sekolah, Guru, Karyawan Swasta, dan Pedagang di pasar.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah penelitian di atas, selanjutnya untuk memperkuat kerangka ilmiah penelitian ini, maka peneliti merumuskan permasalahan utama, yaitu “*Bagaimana Mengurai Prasangka dan Konflik dalam Pembelajaran Sejarah pada Mahasiswa Pendidikan Sejarah?*” melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya prasangka dan konflik di kalangan mahasiswa sejarah?
2. Mengapa prasangka dan konflik pada mahasiswa sejarah bersifat berkelanjutan?
3. Bagaimana langkah-langkah mengurai prasangka dan konflik melalui pembelajaran sejarah?
4. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam mengurai prasangka dan konflik melalui pembelajaran sejarah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan melalui pertanyaan-pertanyaan di atas, sesungguhnya tujuan penelitian ini terangkai menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menangkap dan mendeskripsikan kehidupan sosial dan budaya di lingkungan mahasiswa sejarah yang terkungkung dalam prasangka serta konflik. Melalui fenomena-fenomena yang terjadi, peneliti akan memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang mahasiswa sejarah. Sedangkan, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk

1. Memahami akar penyebab terjadinya prasangka dan konflik di kalangan mahasiswa sejarah;
2. Mengeksplorasi prasangka dan konflik di kalangan mahasiswa sejarah;
3. Mencatat bagian-bagian penting dalam langkah-langkah serta kendala-kendala mengurai prasangka dan konflik di kalangan mahasiswa sejarah yang bersifat kontinuitas; dan
4. Memformulasikan cara mengurai prasangka dan konflik melalui pembelajaran pada Mata Kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta kontribusi bagi seluruh pihak serta *stakeholders* di bidang pendidikan, khususnya di lingkup Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UHAMKA secara langsung dalam memahami prasangka dan konflik di kalangan mahasiswa. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Dari segi teori, penelitian mengenai pendekatan dramaturgi dalam pembelajaran sejarah pada umumnya belum banyak yang meneliti sehingga landasan teori yang ada dalam penelitian ini hanya sebatas menampilkan dramaturgi sebagai “teori” saja. Perlu penguatan-penguatan yang mendalam, sehingga dramaturgi sebagai “pendekatan” dapat bermanfaat bagi revolusi pembelajaran sejarah di masa depan.
2. Dari segi kebijakan, permasalahan tentang prasangka dan konflik yang menghantui cara pandang mahasiswa sejarah perlu diperhatikan secara serius dan berkelanjutan untuk dapat memformulasikan rumusan-rumusan yang relevan yang berorientasi pada *action and solution*, khususnya bagi proses perkuliahan di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UHAMKA.
3. Dari segi praktik, penelitian ini akan menawarkan warna baru dalam pembelajaran sejarah yang melibatkan penalaran dan psikologis bagi mahasiswa sejarah.